



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA
REVITALISASI BLK DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KERJA
KE PROVINSI JAWA TENGAH KOMISI IX DPR RI
TANGGAL 17 – 19 MEI 2019
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2018-2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi UUD RI tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Selanjutnya perjuangan tersebut dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan terkait Program Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja. Oleh sebab itu, kunjungan pengawasan Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraannya sebagai amanat dari undang-undang.

Sejak reformasi, peran BLK sampai sekarang dirasakan semakin menurun. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong revitalisasi BLK yang bertujuan menciptakan balai latihan kerja menjadi rumah kreatif bagi para anak-anak yang punya keinginan dan bakat untuk dikembangkan. termasuk, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing di era revolusi industri 4.0.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi pendidikan dan pelatihan ini bertujuan menyelaraskan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Dari seluruh 303 BLK yang ada di Indonesia, Kemenaker berkewajiban merevitalisasi sarana dan prasarana di BLK. Dari 303 BLK tersebut, diketahui sepertiga dalam keadaan baik, sepertiga sedang, dan sepertiganya lagi dalam keadaan buruk.

Sesuai Permenaker No 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja, yang meliputi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Balai Latihan Kerja Kelas I dan Balai Latihan Kerja Kelas II.

Balai Besar Pelatihan Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja Kemnaker, menyelenggarakan program unggulan di dua kejuruan yaitu, Bisnis Manajemen dan Fashion Technology sebagai bagian dari pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan. Harapannya agar masyarakat banyak yang mengikuti pelatihan di BBPLK dapat memiliki kompetensi yang cukup memadai menghadapi persaingan kerja di tengah masyarakat.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan terkait revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja ini, Panja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR akan melaksanakan Kunjungan Kerja Panja ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta.

B. LANDASAN

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI
2. Pasal 58 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Kesimpulan Internal Rapat Tanggal 09 Mei 2019

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang program revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh dan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan program revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja dan permasalahannya. Serta mendalami lebih lanjut mengenai dampak dan implikasi atas kebijakan tersebut dimasa yang akan datang.
3. Melakukan pengawasan terhadap upaya peningkatan kualitas dan perluasan kesempatan kerja melalui program revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja.
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan semua pihak terkait pelaksanaan program revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja

D. KELUARAN (OUTPUT)

Hasil Kunjungan Kerja ini salah satunya adalah rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga di masa yang akan datang, program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Panja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Keterampilan Kerja Komisi IX DPR RI dengan :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Tengah
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
6. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah
7. APINDO Jawa Tengah

Didampingi Mitra Komisi IX dari

1. Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI

F. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 17 – 19 Mei 2019

I. SUSUNAN ANGGOTA

No	No. Angg.	Nama	Keterangan	Fraksi	Dapil
1	A-460	DR.Saleh Partaonan Daulay.,M.Ag., M.Hum.,MA	Ketua	F PAN	Sumut II
2	A-380	Pius Lustrilanang, S.IP.,M.Si	Anggota	Gerindra	NTT I
3	A-157	Nurmansah E Tanjung, SE	Anggota	PDI-P	Jabar V
4	A-172	Imam Suroso, S.Sos, SH.,MM	Anggota	PDI-P	Jateng III
5	A-239	Betti Sadiq Pasadigoe, SE	Anggota	Golkar	Sumbar I
6	A-301	Drs. Julianus Pote Leba.,M.Si	Anggota	Golkar	NTT II
7	A-349	drg. Putih Sari	Anggota	Gerindra	Jabar VII
8	A-428	Dra. Lucy Kurniasari	Anggota	PD	Jatim I
9	A-39	Mafirion	Anggota	PKB	Riau II
10	A-560	Jalaludin Akbar R, SH	Anggota	Hanura	Sulsel I

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

A. UMUM

Bank Indonesia dalam laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah, Pada Agustus 2017, jumlah pekerja sektor formal Jawa Tengah sebanyak 6,83 juta orang atau 39,73% dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah pekerja sektor formal tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 6,25 juta orang. Jumlah pekerja di sektor informal juga turut meningkat, meskipun proporsinya terhadap jumlah penduduk bekerja menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2017 pekerja informal tercatat sebanyak 10,36 juta orang atau 60,27% dari jumlah penduduk bekerja, mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 10,26 juta orang (62,14%).

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 32,44 juta jiwa dan pada 2025 diproyeksikan bakal mencapai 37,22 juta jiwa. Artinya dalam 25 tahun jumlah populasi di Jawa Tengah bertambah 14,8 juta jiwa atau 192 ribu jiwa per tahun. Rasio ketergantungan penduduk di Jawa Tengah bakal meningkat dari 49,9% pada 2010 menjadi 51,7% pada 2035.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes(2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian(42,34%), diikuti dengan perdagangan(20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98).

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap.

Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora(perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI

Perekonomian Jawa Tengah mencatatkan percepatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,17%; yoy) dan periode yang sama tahun lalu (5,33%; yoy). Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat meningkat pada level 5,19% (yoy) dari triwulan sebelumnya (5,06%; yoy); namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang melambat menjadi sebesar 5,62% (yoy), setelah triwulan lalu tumbuh 5,68% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT). Sementara kinerja investasi, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Sementara dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian; industri pengolahan; dan konstruksi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha perdagangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2017 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat stabil dibandingkan capaian 2016. Pada tahun 2017, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau sama dengan pertumbuhan pada 2016. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri, investasi, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2017. Akan tetapi, komponen impor luar negeri yang juga meningkat tajam menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2017.

Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, sedangkan kinerja pertanian pada 2017 tercatat tumbuh melambat, yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung kegiatan usaha sektor ini.

C. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 relatif membaik, tercermin dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), dan berkurangnya angka kemiskinan. Kondisi ketenagakerjaan Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 mengalami perbaikan, tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta membaiknya kualitas pekerja. NTP pada triwulan IV 2017 mencatatkan surplus yang lebih tinggi yaitu sebesar 103,48; dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 102,56 dan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 99,35. Perbaikan NTP Jawa Tengah pada triwulan IV 2017 didorong oleh meningkatnya penerimaan petani yang jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran.

Lebih lanjut, peningkatan NTP sejalan dengan perbaikan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dari triwulan sebelumnya.

Angka kemiskinan Jawa Tengah pada September 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah per September 2017 sebanyak 4.197 ribu jiwa atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.494 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan secara persentase menjadi 12,23% dari total penduduk Jawa Tengah, atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 13,19% dari jumlah penduduk.

III. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA PANJA REVITALISASI BLK DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KERJA KE PROVINSI JAWA TENGAH

A. KEGIATAN

1. Peninjauan ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
2. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah didampingi
 - i. Kepala BBPLK Semarang
 - ii. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
 - iii. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Tengah
 - iv. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
 - vi. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah
 - vii. APINDO Jawa Tengah

B. TEMUAN-TEMUAN

1. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, merupakan BLK Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP) milik Kementerian Ketenagakerjaan yang pembiayaan program dan kegiatannya seluruhnya bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI. Mekanisme pelaksanaan revitalisasi BLK ditempuh dengan usulan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, diikuti dengan telaahan dari Bappeda dan diusulkan ke Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2. BBPLK Semarang dibentuk pada tahun 2015 dan telah menerima peserta dari seluruh Indonesia pada tahun 2017 sejumlah 1.072 dari 5.152 Orang binaan 16 BLK. Pada tahun 2018 menerima peserta 2.496 Orang dari 6.720 Orang binaan 17 BLK dan tahun 2019 menerima peserta 2.800 Orang dari 8.832 Orang binaan 16 BLK. Rasio tingkat kelulusan peserta yang diterima adalah 1 berbanding 3. Lulusan peserta pelatihan ditempatkan pada perusahaan mitra dunia usaha dan industri yaitu PT. Alfaria Trijaya, PT. Samart, Sinergy dan PT. Pan Brothers.

3. BBPLK Semarang menyelenggarakan program pelatihan meliputi pengembangan program pelatihan kejuruan fashion teknologi dengan spesifikasi program operator garmen menjadi asisten desainer busana dan pelatihan manajemen bisnis berupa e-commerce, web design dan digital marketing.
4. Revitalisasi BLK yang dilaksanakan pada BBPLK di fokuskan pada SDM Pengelola Pelatihan dan Instruktur, Sarana dan Prasarana Pelatihan, Pengembangan Program Pelatihan dan Kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha. Program ini telah mengupgrade instruktur pelatihan industri pada tahun 2018 sejumlah 20 orang untuk proses produksi dan 20 orang instruktur untuk marketing, sales dan distribution pada tahun 2019 ini. Disamping penambahan selanjutnya 20 orang instruktur kejuruan fashion teknologi dan bisnis manajemen 23 orang bekerjasama dengan Indonesian Fashion Chamber.
5. Revitalisasi BLK juga dilaksanakan dengan melakukan perubahan pada sarana dan prasarana pelatihan dari workshop bangunan otomotif, manufaktur, dan las menjadi studio catwalk, studio kreasi, studio bisnis manajemen dan studio produksi. Juga diberikan peningkatan peralatan fashion teknologi dan bisnis manajemen berupa 1 unit alat fashion teknologi dan 1 unit alat bisnis manajemen. Disamping itu, juga diberikan peningkatan sarana pendukung berupa Asrama dengan kapasitas 192 Orang dan Auditorium dengan kapasitas 800 Orang.
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan pelatihan fashion technology yang didukung dengan bisnis manajemen berbasis digital technology meliputi e-commerce, web design dan digital marketing pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang untuk mengembangkan industri fashion technology dalam memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan sebagai upaya untuk menghadapi era persaingan global yang merupakan model pengembangan kesempatan kerja yang lebih advance dibandingkan dengan negara-negara industri seperti China, Jerman dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, Gubernur Provinsi Jawa Tengah sangat mengapresiasi pembentukan Panja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Kesempatan Kerja sebagai upaya bersama antara DPR RI dengan Pemerintah untuk mendorong revitalisasi BLK menjadi isu bersama yang sangat penting dikembangkan pada saat ini.
7. Kendala yang dihadapi adalah anggaran yang terbatas, untuk mengatasinya dilakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, permasalahan yang dihadapi lainnya adalah koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait status kepemilikan lahan.

IV. KESIMPULAN

1. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, merupakan BLK Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP) milik Kementerian Ketenagakerjaan yang pembiayaan program dan kegiatannya seluruhnya bersumber dari APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya telah menerima peserta dari seluruh Indonesia pada tahun 2017 sejumlah 1.072 dari 5.152 Orang binaan 16 BLK. Pada tahun 2018 menerima peserta 2.496 Orang dari 6.720 Orang binaan 17 BLK dan tahun 2019 menerima peserta 2.800 Orang dari 8.832 Orang binaan 16 BLK. Rasio tingkat kelulusan peserta yang diterima adalah 1 berbanding 3. Lulusan peserta pelatihan ditempatkan pada perusahaan mitra dunia usaha dan industri yaitu PT. Alfaria Trijaya, PT. Samart, Sinergy dan PT. Pan Brothers.
2. Program dan Kegiatan BBPLK Semarang yang didukung dengan perhatian dan kebijakan secara luas dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan revitalisasi BLK dan pengembangan kesempatan kerja di Jawa Tengah terutama dalam memberikan pelatihan fashion technology dan bisnis manajemen yang berbasis digital marketing kepada peserta sehingga dapat diterima di industri dan penyerapan tenaga kerja.
3. Program dan Kegiatan BBPLK Semarang dapat menjadi contoh revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja di seluruh Indonesia. Model revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian kewilayahan meliputi Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Barat dengan spesifikasi program pelatihan yang terintegrasi secara nasional.

V. REKOMENDASI

1. Program dan kegiatan pelatihan fashion technology dan bisnis manajemen yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang perlu terus ditingkatkan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan memperluas penyerapan tenaga kerja.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan fashion technology dan bisnis manajemen BBPLK Semarang, perlu ditingkatkan termasuk dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Program revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja di BBPLK Semarang dapat menjadi model revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, di rekomendasikan agar revitalisasi BLK dan pengembangan keterampilan kerja di daerah lain menjadikan program BBPLK Semarang sebagai contoh program pelatihan pada bidang pelatihan lainnya yang terintegrasi secara nasional.

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Revitalisasi BLK dan Pengembangan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Komisi IX DPR RI Masa Sidang V Tahun 2018 – 2019.

Jakarta, Mei 2019

KETUA TIM

Ttd

DR.Saleh Partaonan Daulay.,M.Ag.,M.Hum.,MA

A-460